

BAB II

DESKRIPSI GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Film Dokumenter di Indonesia: Produksi, Distribusi, dan Eksebis

Film dokumenter berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan permasalahan yang lebih kompleks dalam kehidupan manusia secara regional maupun internasional. Saat ini film dokumenter semakin kreatif merekam kemajuan penemuan ilmiah (teknologi canggih), timbulnya beragam jenis penyakit mematikan diiringi serum antivirus-nya, hingga konflik antarkelompok atau negara yang menyulut perang singkat sampai jangka waktu lama dengan peralatan ringan sampai menggerakkan kapal induk organisasi militer internasional.

Istilah dokumenter pertama kali digunakan oleh John Grierson yang pertama kali mengkritik film-film karya Robert Flaherty di New York Sun pada 8 Februari 1926. Salah satunya adalah film *Nanook of the North*, film tersebut tidak lagi sekedar bercerita ala Hollywood. Grierson kemudian menyampaikan pandangannya bahwa apa yang dilakukan oleh Flaherty tersebut merupakan sebuah perlakuan kreatif terhadap kejadian-kejadian aktual yang ada (Fachruddin, 2012: 317-318).

Di Indonesia, industri distribusi film berjalan dalam kondisi pasar yang jarang transparan tanpa terkecuali pada masa Orde Lama, importir film bergabung dalam AMPAI (*American Motion Picture Association of Indonesian*) yang merupakan asosiasi eskportir film Amerika Serikat. Pada era ini, perdagangan film berjalan dengan bebas dengan mengharuskan

setiap film memiliki pasarnya tersendiri. Bioskop kelas A diisi film-film AMPAI sedangkan film nasional berada di bioskop kelas C yang mana bioskop tersebut tidak sesuai dikarenakan jumlah *volume* film Indonesia saat itu berjumlah besar.

Terjadinya kekosongan bioskop Indonesia dari film asal Amerika Serikat diisi dengan film yang berasal dari China dan negara-negara Eropa Timur tetapi selera audiens tidak mudah dibentuk dengan hadirnya film tersebut. Alih-alih kekosongan ini dijadikan sebagai bentuk kebangkitan film Indonesia malah sebaliknya mengalami kemunduran. Produksi film Indonesia melorot hanya 1-2 film pada tahun 1965. Ketiadaan film yang ditayangkan ke berbagai gedung bioskop akhirnya menyebabkan banyak bioskop yang bangkrut.

Perubahan terjadi sejak Orde Baru berkuasa. Kehancuran perfilman Indonesia sejak tahun 1965 yang membuat pemerintah perlu membangkitkan kembali industri film. Jalan yang dilakukan pemerintah dengan membuka impor film dengan bergabung dalam Gabungan Importir-Produsen Film Indonesia (GIPRODFIN). Berbeda dengan Orde Lama yang mengarah pada negara Eropa Timur dan China, pemerintah Orde Baru membuat keputusan yang jauh berbeda dengan lebih mendekat pada Blok Barat sehingga film-film Amerika Serikat dapat kembali ditayangkan bioskop Indonesia.

Pada tahun 1972, di bawah kepemimpinan Menteri Penerangan Boediarjo, mekanisme pengaturan tata niaga mulai mendapatkan masalah.

Pada masa tersebut, sebanyak 16 perusahaan importir film Mandarin menjadi heboh yang disebabkan secara tiba-tiba CV Asia Baru mendapatkan hak tunggal dalam mengimpor film Mandarin. Kebijakan lain yang berkaitan dengan impor film adalah tekanan pemerintah pada importir film dengan mewajibkan mereka bergabung dalam badan-badan konsorsium yang dibagi dalam beberapa kategori yaitu Amerika Serikat – Eropa, Asia, Asia non Mandarin. Alasan pemerintah ini bertolak belakang dengan pengakuan dari importir yakni mereka sebenarnya ditekan bergabungnya dengan badan-badan tersebut atau izinnya dicabut (Sen dalam Arifianto dan Junaedi, 2014: 75-76).

Pada dekade 1990-an, produksi film Indonesia merosot jauh dan berdampak pada terbatasnya film Indonesia yang ditayangkan di gedung bioskop. Setelah Orde Baru lengser, jaringan bioskop 21 mulai memperlihatkan sikap yang lunak terhadap film nasional yakni sebelumnya jaringan bioskop tersebut tidak menerima film-film nasional mendadak film nasional mendapat tempat dengan ditandai waktu jam tayang bagi film Indonesia. Menu utama film Indonesia yang paling mudah dijual dan serempak murah diproduksi adalah film bergenre horor dan kekerasan yang didalamnya dibumbui seks. Gempuran film impor Amerika Serikat sebagai akibat kebijakan ekonomi “daging sapi” dimana impor film Amerika Serikat dibuka lebar dengan imbalan pembukaan kran impor Amerika Serikat yang menyebabkan film Indonesia harus bersaing dengan film Hollywood dan disaat yang bersamaan juga distribusi film yang

dikuasai jaringan 21 menyebabkan film Indonesia semakin sekarat dengan alasan liberalisasi perdagangan internasional tanpa persiapan yang memadai dari industri dunia film nasional telah memukul telak para produser film di Indonesia dan untuk melawan krisis maka horor, kekerasan dan seks menjadi genre pilihan untuk selamat dari krisis. Ini yang menyebabkan kualitas film Indonesia sekarat secara kualitas pada waktu itu (Arifianto dan Junaedi, 2014: 78).

Festival film merupakan salah satu elemen penting dunia perfilman karena menciptakan ruang pertemuan antara pembuat film, penonton, *investor*, dan pemerintah. Ruang tersebut tercipta melalui pemutaran, diskusi, pameran, dan hibah produksi. Melalui festival film tersebut, berbagai pihak dapat berinteraksi, bernegosiasi, dan menjalin kerja sama (Suwanto, 2017: 75). Lokasi pemutaran film bisa berlangsung di ruang kuliah, ruang seminar di kampus, pendopo, kafe, dan pusat kebudayaan yang ada.

Salah satu festival film yang telah berproses sejak 2002 yaitu FFD. Festival film khusus dokumenter ini merupakan yang pertama diselenggarakan di Asia Tenggara. Sampai saat ini FFD berjejaring dengan berbagai festival film dan lembaga internasional yang memiliki kemauan dengan kegiatan sosial dan kebudayaan yang memiliki keberpihakan tertentu. FFD menjadi pelopor di Asia Tenggara untuk melekat tentang film dokumenter.

Kemudian JAFF berdiri sejak 2006. Festival yang memberi perhatian tinggi terhadap karya-karya terbaik Asia ini merupakan bagian dari jejaring internasional NETPAC (*Network for the Promotion of Asian Cinema*). JAFF digerakkan dengan kecintaan yang tinggi atas pencapaian estetika sinema dan juga dukungan dari komunitas film dari berbagai daerah yang militant di Indonesia juga menguatkan kerja JAFF. Aset luar biasa ini menjadikan JAFF menjadi milik bersama dan sudah berjalan 10 tahun penyelenggaraannya. Festival ini diselenggarakan di Yogyakarta (Taslim, 2016: 24-25).

B. Profil Film Dokumenter Bulu Mata



Gambar 2.1 Poster Film Dokumenter Bulu Mata

Sumber: *Instagram* @tonnytrimarsanto

1. Sutradara Film Bulu Mata

Tonny Trimarsanto lahir di Klaten 21 Oktober 1970 adalah seorang sutradara dan *fasilitator workshop* film dokumenter. Tonny merupakan alumni Institut Kesenian Jakarta yang telah membuat puluhan karya film dokumenter. Ia mengawali karir di dunia perfilman

sebagai periset materi visual, penulis skenario dan penata artistik. Sebelum memproduksi film sendiri Tonny Trimarsanto pernah memproduksi film dengan Garin Nugroho yang berjudul “Daun Diatas Bantal”. Ia dikenal sebagai sutradara film waria karena sudah lebih dari 3 film yang digarap mencakup soal *transgender*.

Pada tahun 1997, ia meraih penghargaan sebagai *Best Art Director* di Indonesia Cine Club Film Festival untuk film “Daun Diatas Bantal”. Lalu ia membuat film dokumenter yang berjudul “Gerabah Plastik” dan film tersebut meraih penghargaan film terbaik di Festival Film Dokumenter tahun 2002. Tak lupa juga, film panjang pertamanya “Serambi” masuk seleksi *Un Certain Regard* dalam kompetisi di 59th Cannes Film Festival 2006. Dan pada tahun 2010, film karyanya tentang *transgender* yang berjudul “Renita, Renita” berhasil memenangkan penghargaan sebagai film terbaik di Festival Film India.

2. Rumah Dokumenter

Rumah Dokumenter adalah rumah produksi yang berdiri pada tahun 2002 di Klaten, Jawa Tengah. Rumah Dokumenter merupakan lembaga atau komunitas yang bergerak di bidang perfilman dengan *genre* dokumenter. Selain membuat film, Rumah Dokumenter juga memproduksi buku tentang dunia perfilman dokumenter sebagai referensi lokal.

Melalui film, Rumah Dokumenter sudah banyak mengangkat cerita menarik dan isu dari berbagai realitas. Rumah Dokumenter

memiliki tiga program yaitu produksi, edukasi, dan jejaring. 1) produksi film dokumenter memberikan jasa layanan kreatif, produksi hingga desain kampanye media untuk film dokumenter dan *report* program. Ide dari klien digarap dengan kreatif menjadi sebuah karya hingga dapat dinikmati oleh siapapun yang menontonnya. 2) edukasi memberikan pelatihan kepada pemula ataupun masyarakat umum yang ingin belajar tentang film dokumenter. Mulai dari siswa siswi SMA, SMK, Mahasiswa ataupun praktisi pembuat film dokumenter serta melalui screening regular pemutaran film. 3) adanya jejaring dengan menjalin dengan banyak pihak bagi pertumbuhan film dokumenter. (Sumber: <https://rumahdokumenter.com/>)

3. Film Bulu Mata

Pada film Bulu Mata ini semua peran berasal dari provinsi Aceh. Subjek-subjek yang ada pada film tersebut berkumpul di satu tempat akan tetapi mereka tersebar dari banyak kota yang ada di provinsi Aceh.

Film ini menceritakan tentang *transgender* di Bireun yang mana tempat tersebut menjadi tempat berkumpul sekaligus salon untuk mereka para subjek mencari nafkah kehidupan sehari-hari.

Pada film Bulu Mata, semua peran adalah bagian penting dari proses pembuatan film tersebut. Ia tidak hanya menjadi subjek dan narasumber tetapi dapat mewakili pembuat film untuk menggali informasi mewakili *transgender* di daerah lain dari awal hingga selesai pengambilan gambar dengan kamera sebagai medium bercerita.

Sasaran penonton film ini adalah dipertontonkan di banyak wilayah maupun kota yang butuh pendampingan serta menghadapi persoalan dengan keluarga-keluarga yang tidak bisa anggota keluarganya menjadi *transgender*.

Media penayangan dan distribusi film ini didistribusikan oleh Rumah Dokumenter melalui jalur festival film maupun acara-acara yang menyelenggarakan pemutaran film dengan tema yang sesuai. Pembuat film juga selektif memberikan izin pemutaran film ini ke beberapa acara screening untuk dijadikan bahan diskusi bersama namun dengan catatan karena film ini mengandung isu yang sensitif serta menjaga identitas para *transgender* yang ada pada film tersebut.